

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Proses ini mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan suatu negara sebaiknya difokuskan pada tiga aspek utama: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan dasar, memperbaiki standar hidup masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan social (Todaro & Smith, 2013).

Permasalahan ekonomi makro mencakup rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan, dan tingginya angka pengangguran. Ketiga faktor ini saling terkait dan dapat menghambat kemajuan suatu negara (Mankiw, 2013). Keberhasilan perkembangan ekonomi selalu dikaitkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak *multiplier* yang besar terhadap banyak aspek ekonomi dan sosial masyarakat, terutama terhadap beberapa permasalahan sosial misalnya kemiskinan, dan pengangguran (Prawoto, 2021).

Berdasarkan pernyataan Ernawati (2024) pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai sejauh mana sebuah aktivitas suatu perekonomiannya yang telah mampu menghasilkan suatu tambahan pendapatan seorang masyarakat dalam suatu periode yang tertentu. Dapat juga dinyatakan bahwa terdapat sebuah perekonomian yang terus tumbuh maka terdapat kesempatan kerja, pengurangan

tingkat dalam kemiskinan, perbaikan gizi dan kesehatan, dan termasuk sebuah pendidikan yang akan menjadi baik (Astuti & Mispityanti, 2019). Negara yang telah mempunyai sebuah pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu merupakan seorang masyarakatnya yang telah berada di negara tersebut yang sudah dapat memenuhi suatu kebutuhan dasarnya dan bahkan juga mampu mendapatkan sebuah kesejahteraannya (Prawoto, 2021).

Masalah kemiskinan menjadi hal yang sangat serius dan menjadi masalah bagi daerah yang kondisi perekonomiannya tertinggal jauh. Dimana strategi pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang menimbulkan suatu realita yakni kemiskinan yang tampak jelas (Adawiyah, 2020). Pada saat seseorang dengan produksi rendah maka, pendapatan akan rendah pula, dengan begitu akan masuklah kedalam satu posisi dikatakan kemiskinan (Yunanto, 2015). Harus ada solusi atau kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan yang di buat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan dengan terpadu dan menyeluruh (Kuncoro, 2012).

Salah satu visi pembangunan nasional adalah mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat dan misi pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dengan salah satu sasaran pokok menurunkan jumlah pengangguran. Sukirno (2013) menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan.

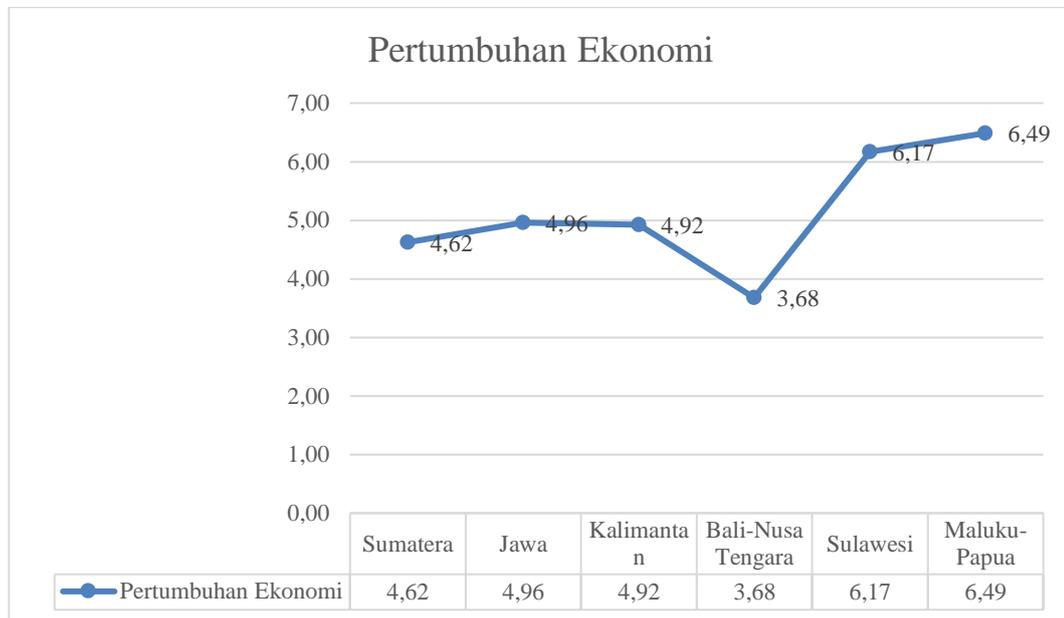
Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh (Pangestu, 2019) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah et al., 2023) bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Apriliansah, 2024) bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari et al., 2024) bahwa ekspor netto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di pengaruhi oleh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Amami & Asmara, 2022) bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Ayu & Faisal, 2021) bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Nisa et al., 2023) bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Adisti, 2010) bahwa ekspor netto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa tingkat pengangguran di pengaruhi oleh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fahira et al., 2023) bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2023) bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Selanjutnya penelitian yang

dilakukan oleh Sinha, (2022) bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pramesti, 2023) bahwa ekspor netto berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

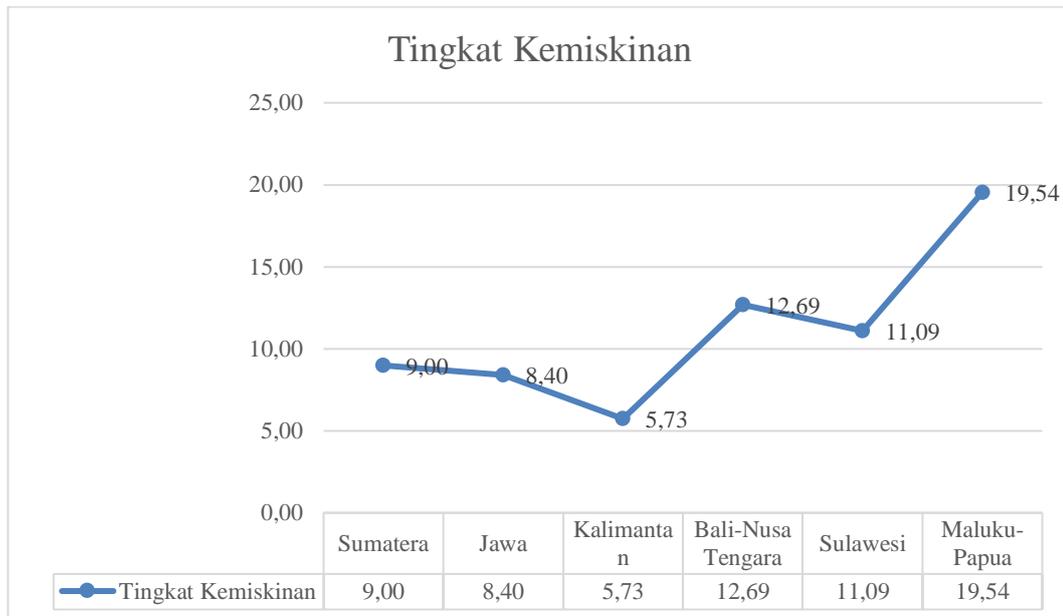


Gambar 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Per-Pulau di Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah Sumatera mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%, diikuti oleh Jawa dengan angka yang sedikit lebih tinggi, yaitu 4,96%. Kalimantan berada sedikit di bawah Jawa dengan pertumbuhan 4,92%. Sementara itu, wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi terendah di antara semua wilayah yang tercantum, yaitu 3,68%. Sulawesi menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan angka 6,17%, dan puncaknya terjadi di wilayah Maluku-Papua dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu 6,49%. Grafik ini menggambarkan variasi dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dengan beberapa wilayah seperti Sulawesi dan Maluku-Papua mengalami akselerasi yang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi yang ditampilkan, salah satu permasalahan utama di Sumatera adalah pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62%, Sumatera tertinggal dari wilayah seperti Sulawesi (6,17%) dan Maluku-Papua (6,49%). Ini menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera mengalami perkembangan yang lebih lambat, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang belum merata, ketergantungan pada sektor-sektor tradisional (perkebunan dan pertambangan), serta kurangnya investasi dalam sektor-sektor industri baru dan modern. Kondisi ini juga bisa mencerminkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah di pulau ini, sehingga diperlukan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh krisis multi dimensional yang melanda seluruh Indonesia akibat dari krisis keuangan global. Walaupun terjadi fluktuatif, namun masih menempatkan Sumatera dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah kedua setelah Pulau Kalimantan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera kemungkinan juga berkaitan dengan tingginya kemiskinan dan pengangguran.



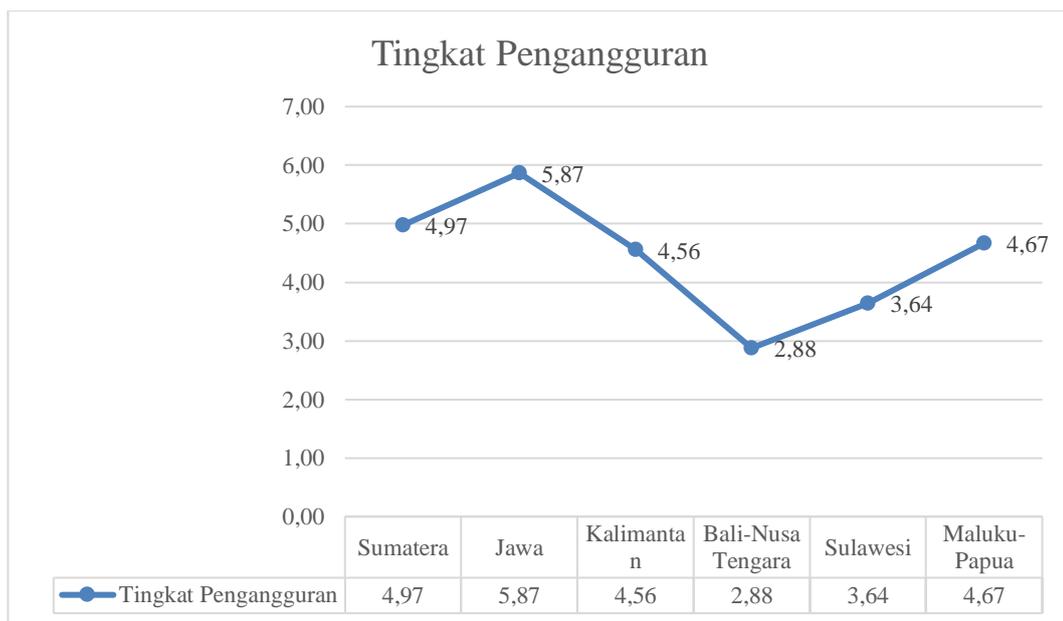
Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Grafik di atas menunjukkan perbandingan tingkat kemiskinan di enam wilayah utama Indonesia. Sumatera memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,00%, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa dengan 8,40%. Kalimantan menempati posisi terendah dengan tingkat kemiskinan hanya 5,73%. Namun, Bali-Nusa Tenggara mencatat kenaikan signifikan hingga 12,69%, lebih tinggi dari Sumatera dan Jawa. Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan 11,09%, sementara wilayah Maluku-Papua menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemiskinan mencapai 19,54%. Perbedaan ini mencerminkan variasi kondisi sosial-ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, dengan beberapa wilayah menunjukkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain.

Permasalahan kemiskinan di Sumatera, dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,00%, mencerminkan tantangan yang signifikan dalam konteks sosial-ekonomi.

Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan wilayah seperti Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi, masih terdapat populasi yang rentan dan terpinggirkan. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan yang tidak memadai, dan infrastruktur yang kurang berkembang menjadi kontributor utama terhadap permasalahan ini. Selain itu, ketidakmerataan distribusi sumber daya dan peluang ekonomi di berbagai daerah di Sumatera dapat memperburuk kondisi masyarakat, sehingga perlu adanya intervensi strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung program-program pemberdayaan yang lebih inklusif. Dengan langkah yang tepat, diharapkan tingkat kemiskinan di Sumatera dapat ditekan lebih lanjut dan kualitas hidup masyarakat meningkat.



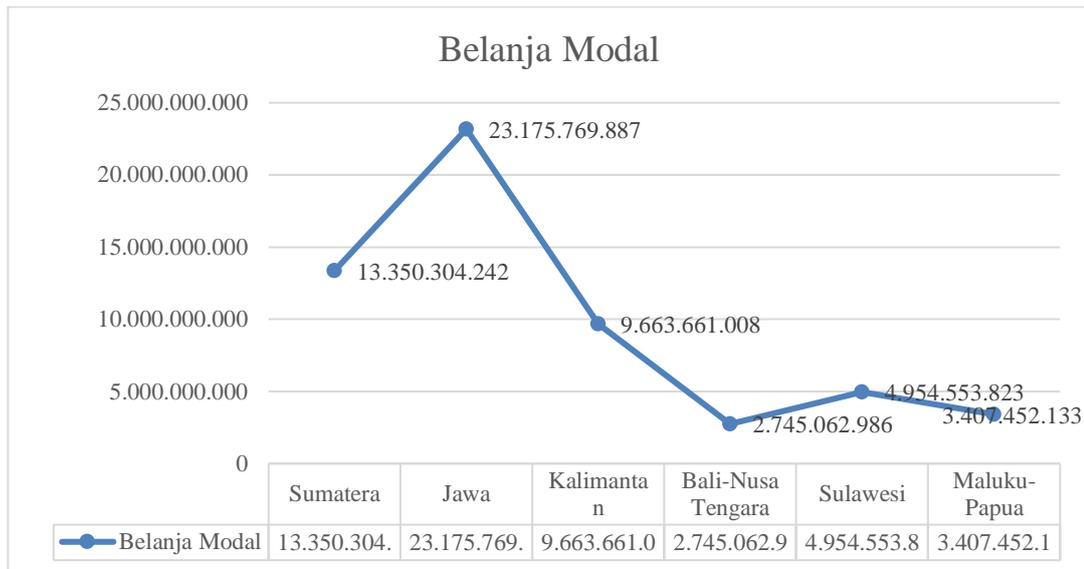
Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.3 Persentase Tingkat Pengangguran di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Persen)

Berdasarkan Gambar tingkat pengangguran tahun 2013 di pulau besar Indonesia, dapat dilihat dalam lingkup yang lebih kecil persentase tingkat pengangguran antarpulau tidak sama atau masih terdapat disparitas antarwilayah. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Pulau Jawa dengan tingkat pengangguran sebesar 5,87 persen, sementara tingkat pengangguran terendah tercatat pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 2,88 persen. Sedangkan Sumatera tingkat penganggurannya sebesar 4,97 persen, tertinggi kedua setelah Pulau Jawa.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya kemiskinan dan pengangguran di Sumatera menunjukkan kondisi makro yang buruk pada provinsi-provinsi di Sumatera. Kondisi makro yang buruk tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah infrastuktur daerah dan keuangan daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Untuk mengetahui seberapa besar peranan pemerintah di dalam menyediakan sarana infrastruktur dapat dilihat dalam realisasi belanja modal dalam APBD masing-masing provinsi pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar nilai belanja modal, maka semakin besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, begitu juga sebaliknya.



Sumber : BPS (2024), data diolah

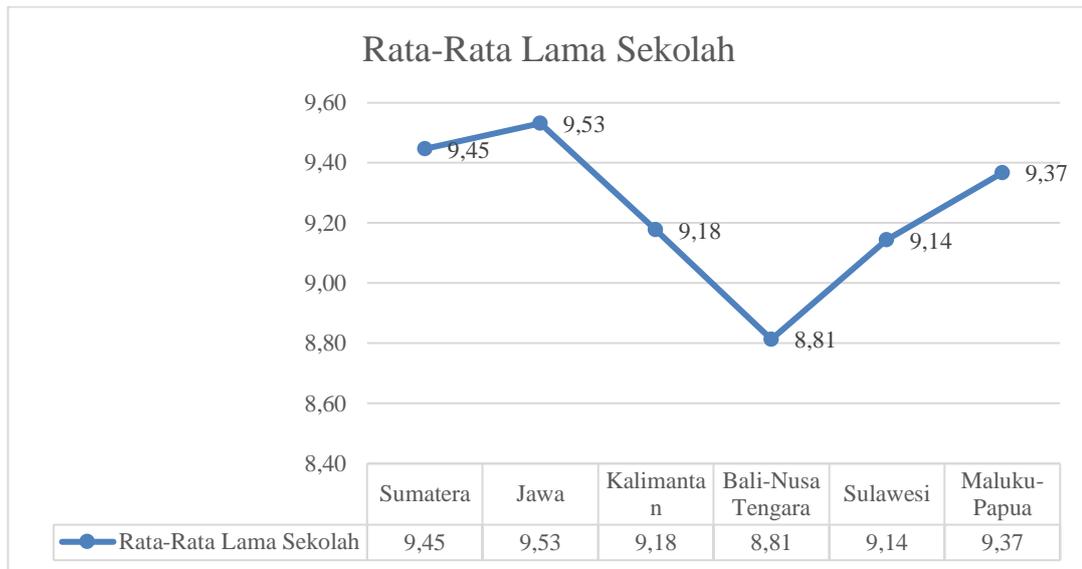
Gambar 1.4 Belanja Modal di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Ribu Rupiah)

Gambar 1.4 menunjukkan belanja modal di berbagai pulau besar di Indonesia pada tahun 2023. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki belanja modal tertinggi, yaitu sebesar Rp. 23.175.769.887 ribu. Hal ini jauh melampaui belanja modal di wilayah lainnya. Di urutan kedua, Pulau Sumatera mencatatkan belanja modal sebesar Rp. 13.350.304.242 ribu. Sementara itu, Pulau Kalimantan berada di posisi ketiga dengan angka Rp. 9.663.661.008. Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat angka terendah sebesar Rp. 2.745.062.986 ribu, diikuti oleh Maluku-Papua sebesar Rp. 3.407.452.133 ribu, dan Sulawesi sebesar 4.954.553.823 ribu.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan

yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi. Pendidikan juga meningkatkan kapasitas individu untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan di pasar tenaga kerja, sehingga mereka lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Ketika lebih banyak orang memiliki akses ke pendidikan, angka pengangguran dan ketergantungan ekonomi menurun, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan (Annisa & Anwar, 2021).

Selain itu, pendidikan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Anak-anak dari keluarga yang berpendidikan cenderung memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan, nutrisi yang lebih baik, dan peluang untuk melanjutkan pendidikan, yang menciptakan siklus positif antargenerasi. Pendidikan juga berkontribusi terhadap kesadaran akan pentingnya partisipasi sosial dan politik, yang memungkinkan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memperbaiki kebijakan publik yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Dengan demikian, pendidikan menjadi salah satu alat paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan dari generasi ke generasi (Vhernando et al., 2024).



Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.5 Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Tahun)

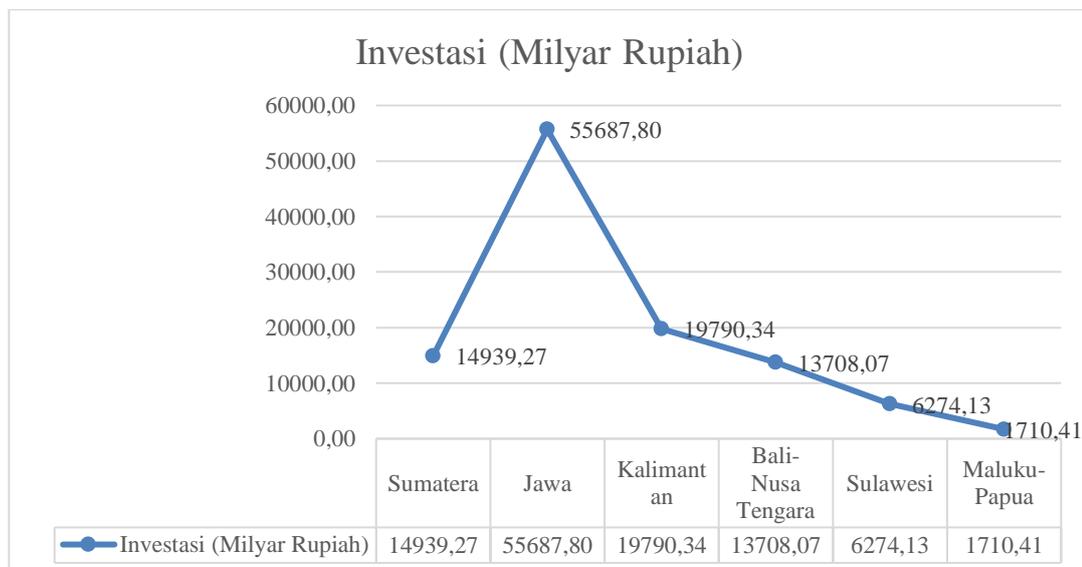
Grafik tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah di berbagai pulau besar di Indonesia. Berdasarkan data, Pulau Jawa memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 9,53 tahun, diikuti oleh Pulau Sumatera dengan 9,45 tahun, dan Maluku-Papua sebesar 9,37 tahun. Pulau Kalimantan mencatatkan rata-rata sebesar 9,18 tahun, sementara Sulawesi berada di angka 9,14 tahun. Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan rata-rata lama sekolah terendah, yaitu 8,81 tahun.

Pulau Sumatera memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 9,45 tahun, seperti yang ditunjukkan dalam grafik. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau Sumatera rata-rata telah menempuh pendidikan hingga kelas 3 SMP atau awal kelas 1 SMA. Nilai ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti Bali-Nusa Tenggara yang memiliki rata-rata lama sekolah

terendah (8,81 tahun), tetapi masih lebih rendah dari Pulau Jawa (9,53 tahun), yang memiliki angka tertinggi.

Angka ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan yang cukup baik di Sumatera, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan. Beberapa faktor yang memengaruhi angka rata-rata lama sekolah di Sumatera antara lain adalah akses terhadap fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan pendidikan di wilayah pedalaman atau daerah terpencil, di mana akses ke sekolah mungkin terbatas. Pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan upaya dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mendukung program wajib belajar, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan untuk meningkatkan angka ini di masa depan.



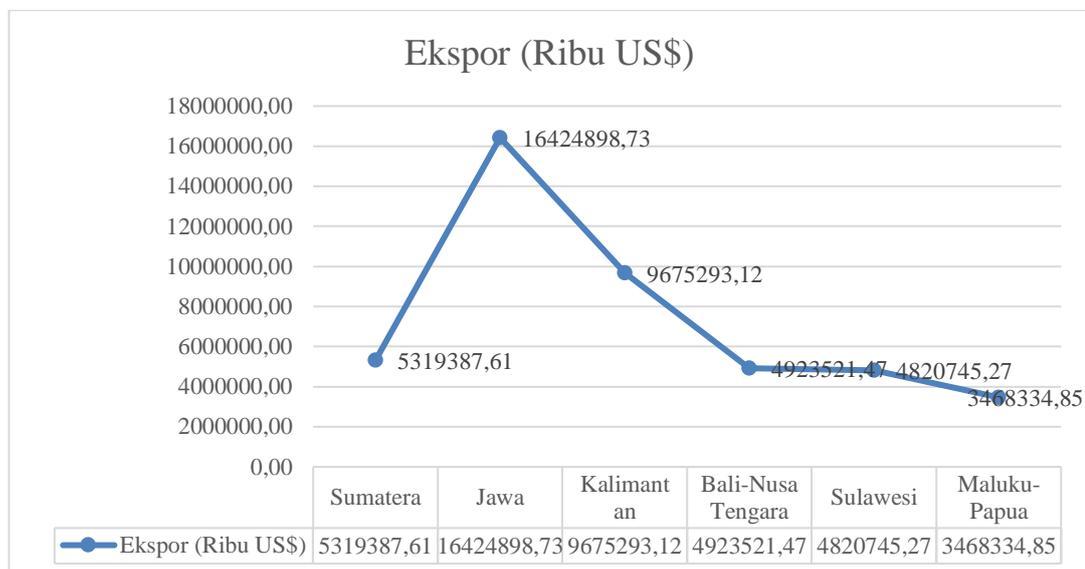
Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.6 Investasi di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.6 menunjukkan investasi (penanaman modal dalam negeri) di berbagai pulau besar di Indonesia pada tahun 2023. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki investasi tertinggi, yaitu sebesar Rp. 55.687,82 miliar. Hal ini jauh melampaui investasi di wilayah lainnya. Di urutan kedua, Pulau Sumatera mencatatkan investasi sebesar Rp. 14.939,27 miliar. Sementara itu, Pulau Kalimantan berada di posisi ketiga dengan angka Rp. 19.790,34 miliar. Pulau Maluku-Papua mencatat angka terendah sebesar Rp. 1.710,41 miliar, diikuti oleh Sulawesi sebesar Rp. 6.274,13 miliar, dan Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 13.728,07 miliar.

Ekspor netto, yang merupakan selisih antara ekspor dan impor, yang diduga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Pertama, peningkatan ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional, yang mendorong investasi dan konsumsi, serta mendiversifikasi sektor-sektor ekonomi, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, sektor yang berkembang melalui ekspor seringkali menarik investasi asing, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan kesempatan kerja di sektor ekspor membantu mengurangi tingkat kemiskinan, karena karyawan di sektor ini biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi, meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat mendanai program-program sosial dan infrastruktur, lebih lanjut mengurangi kemiskinan. Ketiga, ekspansi sektor ekspor menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kualitas pekerjaan serta kondisi kerja. Perusahaan yang berfokus pada ekspor seringkali berinvestasi dalam

pelatihan keterampilan, yang membantu lebih lanjut dalam mengurangi pengangguran. Secara keseluruhan, ekspor netto yang positif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber : BPS (2024), data diolah

Gambar 1.7 Nilai Ekspor Migas dan Non Migas di Pulau Besar Indonesia Tahun 2023 (Ribu US\$)

Gambar 1.7 menunjukkan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas di berbagai pulau besar di Indonesia pada tahun 2023. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki Nilai Ekspor Migas dan Non Migas tertinggi, yaitu sebesar 16.424.899 Ribu US\$. Hal ini jauh melampaui Nilai Ekspor Migas dan Non Migas di wilayah lainnya. Di urutan kedua, Pulau Sumatera mencatatkan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas sebesar 5.319.388 Ribu US\$. Sementara itu, Pulau Kalimantan berada di posisi ketiga dengan angka Rp. 9.675.293 Ribu US\$. Pulau Maluku-Papua mencatat angka terendah sebesar Rp.3.468.335 Ribu US\$, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp. 4.923.521 Ribu US\$ dan Sulawesi sebesar Rp.4.820.745 Ribu US\$.

Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa buruknya kondisi makro di wilayah Sumatera dibuktikan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan tingginya pengangguran. Sementara peranan belanja modal, investasi, pendidikan dan ekspor netto bila dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan dan belanja daerah juga tidak besar. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut pengaruh belanja modal, ekspor netto, pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Sumatera dalam bentuk tesis yang berjudul : “Studi Komparatif Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Sumatera”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan makro yang terjadi di Sumatera sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi dibanding pulau besar lainnya di Indonesia menjadikan Sumatera sebagai prioritas pemerintah untuk memperbaiki kondisi makro yang buruk. Belanja modal sebagai belanja untuk pembangunan infrastruktur menjadi alasan dibalik buruknya kondisi makro yang terjadi di Sumatera. Begitu juga dengan pendidikan dan investasi serta ekspor netto merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera.
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan belanja modal, pendidikan, investasi, ekspor netto, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran antara wilayah Sumatera periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal, pendidikan, investasi dan ekspor netto terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera periode 2019-2023.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Dari penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Manfaat tersebut dapat berguna untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan dan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran sebagai pengembangan penelitiannya. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera sehingga bisa sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.